

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH(2)

by Era Yunian Pradana, Nur Handayani

Submission date: 01-Aug-2023 10:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 2139811597

File name: AH_BENAR_ERA_YUNIAN_PRADANA_1810111391_-_Era_Yunian_Pradana.docx (130.76K)

Word count: 8513

Character count: 56206

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Era Yunian Pradana
erayunianpradana90@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Local-Owned Source revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund on the financial performance of local government in districts/cities of East Java Province. The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used total sampling i.e., all the population members were the sample. In line with that, there were 38 districts/cities of East Java Province during the observation period of 2019-2021. Furthermore, the data were from the realization of regional income and expenditure budgets statement for all districts/cities in East Java Province and were taken from the Financial Audit Agency of East Java Province. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regressions with SPSS 26. The result showed that (1) Local-Owned Source revenue had a positive effect on the financial performance of local government in districts/cities of East Java Province, (2) General Allocation Fund did not affect the financial performance of local government in districts/cities of East Java Province, and (3) Special Allocation Fund had a negative effect on the financial performance of local government in districts/cities of East Java Province.

Keywords: local own-source revenue, general allocation fund, special allocation fund, financial performance of local government

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampel (*sampling total*) dimana dalam pengambilan sampelnya menggunakan seluruh anggota dari populasi kemudian dijadikan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan metode total sampel didapatkan sampel sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan sampel yaitu tahun 2019-2021. Data yang digunakan penelitian ini bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program aplikasi SPSS versi 26. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (2) DAK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (3) DAK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kinerja keuangan pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah merupakan suatu bentuk dari perwakilan pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah ini memiliki peran yang penting terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada pemerintah daerah sekaligus memajukan potensi

yang dimiliki daerah sehingga tercapainya salah satu tujuan pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Dalam menjalankan pemerintahan, pihak pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kewenangan kekuasaan daerah kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada hak otonom dimana salah satu bentuk penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dilaksanakan dalam bentuk otonomi daerah.

Otonomi daerah sudah berlaku sejak tahun 1999 melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengatur semua urusan pemerintah dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 23 Tahun 2014. Menurut Halim (2007) bahwa kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Di dalam pembaruan ini membawa perubahan besar pada sistem pemerintahan di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, seluruh daerah di Indonesia, baik provinsi, kabupaten maupun kota diberikan hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Sumarsono (2010) Dalam sudut pandang keuangan negara, Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan mengelola sumber-sumber keuangan sendiri. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab. Nyata di sini adalah semua urusan penanganan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban secara nyata yang telah ada dan berpotensi tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah tersebut. Kemudian, Bertanggung jawab adalah dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus sejalan dengan apa tujuan dan maksud dari pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk membangun daerah dalam memberdayakan daerah termasuk juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah dituntut dapat mengelola keuangannya sendiri dengan menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan Asli daerah (APBD), yang mana APBD merupakan anggaran keuangan rencana kerja pemerintah daerah dalam kurun waktu periode tahunan dimana anggaran tersebut dapat dijadikan sebagai instrumen utama dalam menyusun dan menentukan kebijakan daerah. Dalam rangka menyusun kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan daerah yang merupakan salah satu dari tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber pendanaan guna menunjang jalannya segala kebutuhan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan dan pengeluaran daerah. Jurnal dari Cherrya Dhia Wenny (2012) menyebutkan pada dasarnya apabila suatu daerah memiliki PAD yang cukup tinggi maka daerah otonom akan semakin leluasa dan mandiri dalam menentukan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula daerah bergantung kepada pemerintah pusat. Selain PAD, penerimaan pendanaan daerah juga berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus merupakan sumber pendanaan dari dana perimbangan. Halim (2014) menjelaskan bahwa dana perimbangan atau yang sering disebut dengan dana transfer ini mempunyai peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. Bagi suatu daerah yang kurang dalam pendapatan atau penerimaan daerahnya yang kemungkinan juga kurangnya sumber daya alam yang dimiliki, dana perimbangan merupakan sumber pendapatan utama yang penting dalam operasional dan pembangunan pemerintahan daerah.

Dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan analisis dan pengevaluasian dalam pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi pondasi yang kuat untuk memaksimalkan keuangan daerah. Dengan ini diperlukan suatu cara guna memaksimalkan keuangan daerah karena hasil dari

pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat memberikan cara pandang tambahan terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang suatu daerah, tugas pemerintah daerah yaitu berperan sebagai pengelola keuangan atau manajer keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan suatu daerah. Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan tersebut dapat dikatakan sebagai kinerja keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2009), menjelaskan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sehingga pengukuran kinerja keuangan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam mengukur penilaian kinerja manajer dan anggota instansi pemerintahan dalam mengimplementasikan uang masyarakat digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan anggaran yang dibuat dan juga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kualitas daerah dan menyejahterakan masyarakatnya.

Pengukuran dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah agar menjadi lebih baik, dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan salah satu rasionya adalah dengan rasio kemandirian. Ulum (2012) menyebutkan bahwa Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Dalam rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri semua kegiatan pelaksanaan dan pembangunan pelayanan sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakatnya yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Artinya, pada setiap kenaikan Pendapatan Asli Daerah pasti akan diikuti dengan kenaikan atau peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Begitupun dengan Dana Perimbangan juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar Dana Perimbangan maka secara relatif atau keseluruhan Dana Perimbangan akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Siagan (2011) menjelaskan bahwa yang disebut dengan teori keagenan adalah suatu hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* sendiri memperkerjakan *agent* untuk melakukan tugas yang diberikan demi kepentingan *principal* termasuk dalam pendelegasian otorisasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *principal* kepada *agent*.

Menurut Halim dan Abdullah (2010) teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Dimana teori keagenan sendiri merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut dengan *principal* dan pihak yang lainnya disebut dengan *agent*. *Principal* merupakan pihak yang dimana bertugas memberikan perintah dalam pengawasan, penilaian, dan masukan atas tugas yang dijalankan oleh agen. Sedangkan *agent* merupakan pihak yang menerima dan menjalankan tugas dari prinsipal sesuai dengan yang diberikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan yang berasal dari penerimaan yang diperoleh daerah dari hasil pungutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan bisa juga berasal dari sumber-sumber potensi kekayaan dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah bisa juga diperoleh dari sektor usaha yang nantinya hasil dari sektor usaha tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan keperluan yang dibutuhkan daerah dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan daerah tersebut. Menurut Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Hal ini dapat diartikan bahwa pendapatan asli daerah merupakan suatu sumber penerimaan kas wilayahnya sendiri sebagai pendapatan yang merupakan sebuah akumulasi dari berbagai sumber penerimaan sebagai berikut: (1) Pajak daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan wajib atau kontribusi terutang yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dimana pajak daerah ini sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui peraturan daerah (Perda). Pemungutan pajak daerah ini dikenakan kepada pihak atau objek orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang ada, serta tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan daerahnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (2) Retribusi daerah merupakan suatu pendapatan daerah yang berasal dari hasil pembayaran atas jasa dalam pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, (3) Hasil pengelolaan kekayaan atau sumber daya daerah yang dipisahkan. Contoh hasil pengelolaan kekayaan atau sumber daya daerah yang dipisahkan meliputi bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat, (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Maksud dari lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah dimana berasal dari lain-lain pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini disediakan oleh pemerintah daerah guna mengakuntasikan penerimaan daerah selain dari pajak, retribusi, dan laba.

4

Dana Alokasi Umum (DAU)

Didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi disini merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemimpin daerah atau lembaga masyarakat.

Penentuan besar kecilnya jumlah dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tergantung dari kebutuhan daerah tersebut. Pada periode tahun 2006-2012, dalam perumusan perhitungan dana alokasi umum pada APBN didasarkan pada UU No. 33 tahun 2004 dengan penetapan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

Pemberian dana alokasi umum ini juga bertujuan untuk menyamakan kemampuan keuangan suatu daerah dengan memperhatikan potensi dari daerah tersebut, luas daerah, keadaan geografi dari daerah tersebut, dan kemudian juga dari jumlah penduduk serta tingkat pendapatan dari daerah tersebut. Sehingga dari potensi daerah yang bisa saja dikarenakan sumber daya alam Indonesia yang tidak merata, untuk menyeimbangkannya DAU disini dimaksudkan untuk memperbaiki dalam pemerataan perimbangan keuangan daerah yang ditimbulkan dari hasil bagi sumber daya atau potensi tersebut.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa Dana alokasi khusus adalah dana yang diperoleh atau bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang memiliki tujuan untuk membantu pendanaan pada kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam pemberian dana alokasi khusus, Pemerintah memberikan penetapan terhadap kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penetapan

kriteria umum didasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah dalam APBDnya (PP No. 55/2005, Pasal 55 ayat 1). Kemudian dalam penetapan kriteria khusus harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada dan dengan karakteristik daerahnya (PP No. 55/2005, Pasal 56 ayat 1). Dalam penetapan kriteria khusus, teknis yang ada ditetapkan oleh kementerian negara/ departemen teknis dan didasarkan pada peraturan yang ada (PP No. 55/2005, Pasal 57 ayat 1).

Dalam membantu Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan khususnya, pemberian DAK harus sesuai atau memenuhi berbagai kriteria kebutuhan sebagai berikut: (1) Kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang ada di daerah terpencil dimana tidak memiliki akses yang memadai untuk ke daerah lain, (2) Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi, (3) Kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai sarana dan prasarana yang cukup memadai, (4) Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah untuk mengatasi dampak dari kerusakan lingkungan.

Pemerintah memberikan penetapan kriteria-kriteria dalam pemberian dana alokasi khusus yang meliputi: (1) Kriteria Umum, Dimana kriteria umum ini ditetapkan dengan persetujuan dan mempertimbangkan kemampuan dari keuangan daerah dalam APBD, (2) Kriteria Khusus disini ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik dari daerahnya, (3) Kriteria Teknis, Secara singkatnya kriteria teknis disini ditetapkan oleh kementerian Negara atau departemen teknis.

Sehingga tujuan dialokasikannya DAK untuk membantu suatu daerah dalam setiap pendanaan yang dibutuhkan secara fisik terhadap sarana dan prasarana yang merupakan prioritas nasional pada sektor kegiatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, irigasi, air minum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, serta perdagangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja bisa juga diartikan sebagai suatu gambaran atau tolak ukur tingkat pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan atau program organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

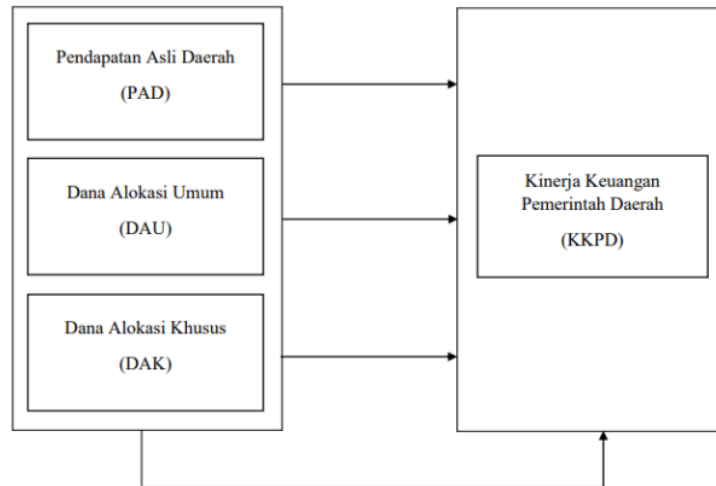
Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan sebuah kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan, menggali, dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerahnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan daerahnya agar tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Sehingga Pemerintah Daerah dapat leluasa dalam memanfaatkan atau menggunakan dana yang ada untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya dengan batasan-batasan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengukuran kinerja disini merupakan suatu proses dalam manajemen atau mengatur apa saja yang digunakan dalam peningkatan kualitas dan pengambilan keputusan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah direncanakan. Pemerintahan wajib melaporkan semua pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar utama dalam penilaian kinerja keuangannya. Menurut Abdul Halim (2007:230) menyatakan bahwa salah satu cara atau alat untuk menilai dan menganalisis pada sebuah kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, yaitu dengan cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD atau rasio keuangan daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil dari analisis tersebut kemudian dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian kemampuan daerah dalam menjalankan daerah otonom.

1

Rerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang telah dijelaskan diatas, maka rerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan yang dimiliki setiap daerah melalui penerimaan pendapatan daerah dari berasal dari berbagai sumber, diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan atau sumber daya daerah yang dipisahkan dan kemudian dari pendapatan asli daerah lain-lain yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah ini bertujuan untuk membiayai dalam pendanaan semua kegiatan-kegiatan atau program yang dijalankan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya agar proses desentralisasi berjalan dengan baik. Melalui pendapatan ini dapat dilihat bagaimana dan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai seluruh kegiatan pemerintah yang ada dari segi pelayanan maupun pembangunan. Sehingga jika pendapatan asli daerah meningkat maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Heryanti *et al.*, (2019), PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Riska (2020) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan kinerja pemerintah daerah.

H₁:Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Alokasi Umum bersumber dari dana transfer pendapatan APBN. Pemberian DAU untuk membatu setiap pendanaan daerah yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Jika realisasi anggaran terdapat defisit atau belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah, untuk mengatasi pemerintah pusat melakukan transfer dana dalam bentuk dana perimbangan. Dana tersebut memberikan pengaruh dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU

daripada pendapatan asli daerah yang dimiliki untuk kepentingan setiap pembiayaan-pembiayaan daerah. Sehingga memperlihatkan kinerja keuangan daerah tersebut dipengaruhi oleh dana alokasi umum.

Pengukuran dari besar dana alokasi umum yang diterima daerah akan menggambarkan bagaimana tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai setiap pendanaan daerah. Semakin besar dana alokasi umum yang diberikan maka pemerintah daerah semakin menggantungkan kepada bantuan pendanaan dari pemerintah pusat yang mengakibatkan penurunan kemandirian kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiowati (2017) menunjukkan pengaruh negatif dari dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Putri (2019) juga memiliki pengaruh negatif. Kemudian penelitian oleh Triska (2020) juga menunjukkan pengaruh negatif.

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan dengan tujuan untuk mengurangi beban biaya pada kegiatan khusus yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Dana alokasi khusus disini digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah sebagai prioritas nasional untuk membiayai seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dalam peningkatan pembangunan daerah. Jika dana alokasi khusus semakin besar, dapat dikatakan bahwa daerah belum mandiri dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakatnya karena pemerintah daerah masih mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat sebagai penerimaan pendapatan utamanya.

Penelitian yang dilakukan Abdullah (2015) menunjukkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Leni (2017) dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Susanti dan Ratih (2018) juga tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Triska (2020) dimana menunjukkan hasil bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₃: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menguji pada teori populasi sampel tertentu dengan mengukur dari variabel penelitian berupa angka dan kemudian dilakukan analisis data dengan prosedur statistik yang ada.

Menurut Sugiyono (2016:136) menyebutkan gambaran dari populasi secara *general* atau umum disini merupakan sebuah wilayah yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 Kabupaten/Kota dimana terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan data penelitian selama 3 periode dari 2019-2020.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:137) menyebutkan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan total sampel (*sampling total*) atau sensus dimana dalam

pengambilan sampelnya menggunakan seluruh anggota dari populasi yang ada kemudian dijadikan sebagai sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil data dari laporan realisasi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang didapatkan dari badan pemeriksa keuangan Jawa Timur yang kemudian diuji menggunakan teknik analisis data menggunakan metode analisis persamaan linier berganda menggunakan purposive sampling.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan data dokumenter dengan mempelajari dari catatan dokumen yang sudah ada. Sumber data menggunakan data sekunder dimana data yang diperoleh sudah disediakan. Menurut Soewardji (2012:147) data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah berbentuk jadi yang siap digunakan.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi diperoleh dari instansi yang terkait yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2019-2021. Data juga berasal dari internet dan kepustakaan dengan membaca dan mengutip dari beberapa referensi yang ada dimana memiliki keterkaitan terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu penerimaan daerah berupa pendapatan yang berasal dari potensi penerimaan sumber ekonomi daerah yang diperoleh daerah dari hasil pungutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan bisa juga berasal dari sumber-sumber potensi kekayaan dari daerah itu sendiri. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Mahmudi (2010) menyebutkan bahwa pengukuran dari rasio Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan melihat nilai dari pendapatan asli daerah itu sendiri yang telah disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dibandingkan dengan total penerimaan daerah tersebut. Marizka (2013) juga menyebutkan bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah juga dapat diukur dengan cara melihat nilai pada PAD yang telah disajikan dalam laporan realisasi anggaran APBD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersumber dari pendapatan APBN. Dana alokasi umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan pendanaan keuangan antar daerah untuk mendanai setiap kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum ini memiliki sifat *block grant* yang artinya penggunaan dalam pengalokasian pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah sesuai

dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pada pelayanan masyarakat dalam rangka otonomi daerah.

Dasar pengalokasian dana alokasi umum ini pada presentasi dari 26% pendapatan dalam negeri (PDN) netto yang telah ditetapkan dalam APBN. Dalam penetapan pengalokasian dana alokasi umum menggunakan kriteria yang menekankan pada aspek dari pemerataan dari pengalokasian dana yang telah diberikan dan juga pada aspek keadilan yang sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Marizka (2013) menyebutkan Dana alokasi umum diperoleh dari Laporan Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam penelitian ini dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio DAU} = \frac{\text{DAU}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana transfer yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah yang memiliki sifat terikat dimana bertujuan untuk membantu dalam mendanai segala bentuk kegiatan khusus fisik ataupun non-fisik yang merupakan salah satu dari urusan daerah dan merupakan salah satu bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Dana alokasi khusus berasal dari dana APBN dialokasikan dalam rangka desentralisasi dimana pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan suatu proses dalam pengambilan keputusan public yang lebih demokrat. Dalam pemberian dana alokasi khusus, Pemerintah telah memberikan penetapan terhadap kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Marizka (2013) menyebutkan dana alokasi khusus diperoleh dari Laporan Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dalam penelitian ini dibandingkan dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio DAK} = \frac{\text{DAK}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Variabel Dependen

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk menjadikan tolak ukur sebagai tingkat pencapaian suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan atau program organisasi untuk mewujudkan sebuah tujuan organisasi tersebut. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah juga merupakan sebuah kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya agar tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Halim (2007:213) menjelaskan bahwa ada beberapa rasio dimana dapat dijadikan tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Didalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio kemandirian. Rasio kemandirian ini menggambarkan bagaimana tingkat kemampuan pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat atau pihak eksternal dalam membiayai sendiri kegiatan untuk membangun dan mengatur kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan yang ada atau bersumber dari pendapatan transfer dari pihak eksternal. Halim (2007:231) menjelaskan bahwa, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah akan memperlihatkan jika tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Sehingga dapat dikatakan tingkat rasio kemandirian lebih tinggi daripada tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman}} \times 100\%$$

Teknis Analisis Data

Teknis Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis statistik deskriptif adalah suatu pengujian dalam penggunaan statistik dalam menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sehingga memberikan suatu gambaran yang dilihat dari nilai standar defisiensi, nilai maksimum dan minimum, kemudian nilai rata-rata.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan, terdapat korelasi pada variabel yang mengganggu pengaruh hubungan antara variabel bebas dengan terikat yang mana memiliki distribusi yang normal atau tidak. Menurut Ghozali (2018:163) menjelaskan bahwa uji normalitas dalam penelitian dapat dilakukan melalui pendekatan grafik atau (*Normal P-Plot*) dengan dasar keputusan: (1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal. (2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal.

Ghozali (2018:163) juga menyebutkan bahwa jika dalam uji normalitas tidak dilakukan dengan teliti dan hati-hati maka grafik tersebut dapat menyesatkan dimana secara visual terlihat normal sedangkan secara statistik terlihat sebaliknya. Untuk menghindari kesalahan tersebut uji grafik dapat dilengkapi dengan uji statistik yang mana salah satu uji statistik yang dapat digunakan adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* yang mana termasuk uji statistik non-parametrik. Kriteria uji statistik ini sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka data berdistribusi dari uji statistik adalah normal,. (2) Jika nilai signifikan < 0,05 maka data berdistribusi dari uji statistik adalah tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat dan menguji guna menemukan ada tidaknya korelasi antara variabel bebas. Untuk mengetahui apakah terjadi masalah multikolinieritas atau tidak, dapat dilihat pada nilai *tolerance* (TOL) sebagai besarnya tingkat kesalahan yang dibenerkan secara statistik dan juga dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) apabila nilai *Tolerance* (TOL) $\leq 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 maka hal ini menunjukkan adanya multikolinieritas atau korelasi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi linear ini memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t sebelumnya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilihat menggunakan tes uji *Durbin Watson* (DW) yang didasarkan pada ketentuan atau kriteria sebagai berikut: (1) Jika nilai DW dibawah -2 atau DW < 2 maka terjadi autokorelasi positif, (2) Jika nilai DW berada diantara -2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi, (3) Sedangkan, jika nilai DW diatas 2 atau DW > 2 maka terjadi autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji kejadian dalam model regresi apakah memiliki perbedaan dalam ketidaksamaan varian dari residual pada suatu periode peneliti satu dengan peneliti lainnya. Jika varian dari peneliti atau pengamat satu dengan lainnya

memiliki perbedaan dapat disebut sebagai heteroskedastisitas. sedangkan jika varian peneliti atau pengamat satu dengan lainnya tetap disebut dengan homoskedastisitas.

Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas, dapat diketahui dengan grafik *Scatterplot* dan uji park. Grafik *scatterplot* disini untuk melihat ada tidaknya antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah sumbu Y yang telah di prediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah diolah. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: (1) Jika ada pola tertentu seperti halnya titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), dan nilai signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ pada uji park, maka mengidentifikasi terjadi heteroskedastisitas, (2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y atau bisa dikatakan tidak membentuk pola secara acak dan nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ pada uji park, maka terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis persamaan regresi linier berganda merupakan alat analisis yang digunakan dalam penelitian dimana memiliki tujuan untuk mengukur dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang terjadi antara kedua variabel antara variabel dependen dan variabel independen. Perumusan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KKPD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

Uji F

Uji F juga dikenal sebagai uji kelayakan model atau uji signifikansi dalam keseluruhan dari regresi sampel memiliki tujuan untuk menunjukkan bagaimana pengaruh yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen sebagai tolak ukur apakah regresi pada penelitian ini layak untuk dijadikan sebagai alat estimasi. Kriteria pengukuran dari pengujian pengaruh pada uji F ini adalah sebagai berikut: (1) Jika tingkat nilai signifikan pada uji F $< 0,05$ maka model regresi berpengaruh secara signifikan sehingga layak, (2) Jika tingkat nilai signifikan pada uji F $> 0,05$ maka model regresi ini tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak layak.

Uji (R²)

Uji (R²) atau uji koefisien determinan bertujuan untuk mengukur dan menilai seberapa kuat tingkat kemampuan dari persamaan regresi dalam mempengaruhi antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan koefisien regresi *Adjusted R Square* dikarenakan apabila nilai R² mendekati satu, maka hubungan antara kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variabel dependennya semakin baik. Sedangkan jika nilai R² mendekati nol, maka hubungan antara kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variabel dependennya semakin buruk.

Uji T

Uji T dalam penelitian bertujuan untuk menguji dan menunjukkan seberapa jauh dan maksimal pengaruh pada variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Uji T ini dilakukan dengan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis sebagai berikut: (1) Jika tingkat signifikan $< 0,05$ maka hipotesis dapat diterima dan memiliki pengaruh yang signifikan, (2) Jika tingkat signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau tidak diterima karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 47.963 km². Provinsi Jawa Timur memiliki populasi penduduk yang mana menurut database BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2022 berjumlah 41.149.947 jiwa. Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/ kota dimana terdapat 29 kabupaten dan 9 kota. Data dalam penelitian ini didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Perwakilan (Jawa Timur) berdasarkan laporan realisasi anggaran dengan periode 3 tahun mulai dari 2019-2021. Selanjutnya diolah menggunakan SPSS 26 menghasilkan sampel penelitian sebesar 114 sampel data observasi.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis data yang menggunakan *statistic* dalam menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sehingga memberikan gambaran yang dilihat dari nilai standar defiasi, nilai maksimum dan minimum, kemudian nilai rata-rata. Hasil uji analisis statistik deskriptif, sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
PAD	114	,07	,61	,187	,0929
DAU	114	,14	,51	,408	,0776
DAK	114	,04	,18	,119	,0330
KP	114	,09	1,73	,272	,2493
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, hasil yang diperoleh analisis deskriptif sebagai berikut: (1) Variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar 0,07, nilai maksimum sebesar 0,61, mean sebesar 0,187, dan nilai standard deviasi sebesar 0,0929. Nilai mean yang lebih besar menandakan bahwa penyebaran nilai merata, (2) Variabel DAU memiliki nilai minimum sebesar 0,14, nilai maksimum sebesar 0,51, nilai mean sebesar 0,408, dan nilai standard deviasi sebesar 0,0776. Nilai mean yang lebih besar menandakan bahwa penyebaran nilai merata, (3) Variabel DAK memiliki nilai minimum sebesar 0,04, nilai maksimum sebesar 0,18, nilai mean sebesar 0,119, dan nilai standart deviasi sebesar 0,0330. Nilai mean yang lebih besar menandakan bahwa penyebaran nilai merata, (4) Variabel KP memiliki nilai minimum sebesar 0,09, nilai maksimum sebesar 1,73, nilai mean sebesar 0,272, dan nilai standard deviasi sebesar 0,2493. Nilai mean yang lebih besar menandakan bahwa penyebaran nilai merata.

Uji Normalitas

Ghozali (2018:163) juga menyebutkan bahwa jika dalam uji normalitas tidak dilakukan dengan teliti dan hati-hati maka grafik tersebut dapat menyesatkan dimana secara visual terlihat normal sedangkan secara statistik terlihat sebaliknya. Hasil uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, sebagai berikut:

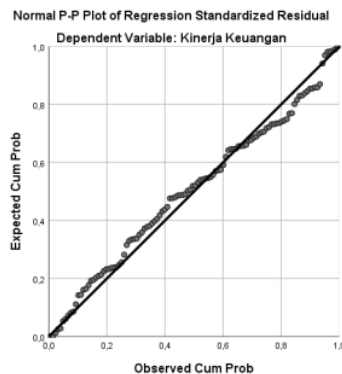
Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04679374
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,073
	Negative	-,063
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,190

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3 diatas, diketahui bahwa nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* menunjukkan nilai sebesar 0,190 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data didalam penelitian ini berdistribusi normal.

Ghozali (2018:163) menjelaskan bahwa uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui pendekatan grafis dengan dasar keputusan jika data menyebar disekitar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal artinya data tersebut menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika sebaliknya, data menyebar menjauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal artinya data tersebut tidak menunjukkan pola distribusi yang normal dan model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas



1 **Gambar 2**
Grafik Normal Probability Plot
 Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 2 diatas, dapat diketahui bahwa titik-titik mendekati garis diagonal dan tidak menjauhi garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa dapat berdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji dan mendeteksi guna menemukan ada tidaknya korelasi antara variabel independen. Model regresi dapat dikatakan baik jika antara variabel independen tidak ada korelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi masalah multikolinieritas atau tidak, dapat dilihat pada nilai *tolerance* (TOL) sebagai besarnya tingkat kesalahan yang dibenerkan secara *statistic* dan juga dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jadi apabila nilai *Tolerance* (TOL) $\leq 0,10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≥ 10 maka hal ini menunjukkan adanya multikolinieritas atau korelasi. Hasil uji multikolinieritas, sebagai

berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistics			Keterangan
	B	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	-1,088			
PAD	2,407	0,355	2,815	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DAU	,105	0,507	1,971	Tidak Terjadi Multikolinearitas
DAK	-,438	0,551	1,815	Tidak Terjadi Multikolinearitas

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10. Variabel PAD memiliki nilai tolerance sebesar 0,355 dan nilai VIF sebesar 2,815. Variabel DAU memiliki tolerance sebesar 0,507 dan nilai VIF sebesar 1,971. Variabel DAK memiliki nilai tolerance sebesar 0,551 dan nilai VIF sebesar 1,815. Dapat disimpulkan bahwa di dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ini memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 dengan periode t sebelumnya. Untuk mengetahui model ini terhindar dari autokorelasi atau tidak dapat didasarkan pada ketentuan atau kriteria uji Durbin Watson (DW) sebagai berikut:

- Jika nilai DW dibawah -2 atau $DW < -2$ maka terjadi autokorelasi positif.
- Jika nilai DW berada diantara -2 sampai 2 maka tidak terjadi autokorelasi.
- Jika nilai DW diatas 2 atau $DW > 2$ maka terjadi autikorelasi negatif.

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,960	,958	,04743	,821

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

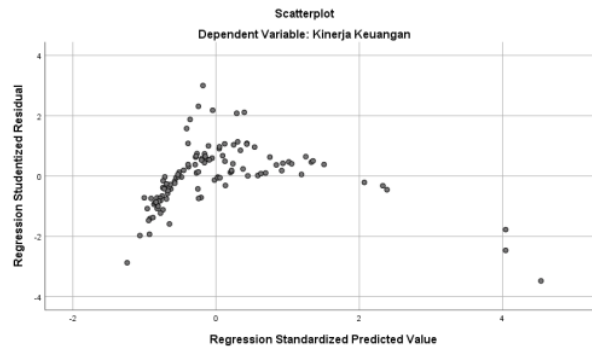
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson menunjukkan nilai 0,821, yang artinya nilai tersebut berada diantara -2 hingga 2. Dapat disimpulkan bahwa didalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji kejadian dalam model regresi apakah memiliki perbedaan dalam ketidaksamaan varian dari residual peneliti satu dengan peneliti lainnya. Jika varian dari peneliti atau pengamat satu dengan lainnya memiliki perbedaan dapat disebut sebagai heteroskedastisitas.



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk sebuah pola yang teratur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,019	,034		-,568	,571
PAD	,432	,052	,787	8,363	,070
DAU	-,114	,052	-,173	-2,198	,125
DAK	,279	,117	,180	2,384	,094

a. Dependent Variable: KPPD

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Pengujian dalam Uji Heterokedastisitas dalam penelitian ini juga menggunakan uji glejser dengan cara meregresikan hasil dari residu 1 variabel bebas yang kemudian ditransform menggunakan rumus nilai absolut. Berdasarkan hasil dari pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan uji glejser pada tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 sehingga penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis persamaan regresi linier berganda merupakan alat analisis yang digunakan dalam penelitian dimana memiliki tujuan untuk mengukur dan mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang terjadi antara kedua variabel antara variabel dependen dan variabel independen. Berdasarkan dari pengolahan data, diperoleh hasil dari analisis regresi linear berganda yang disajikan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,088	,053		-20,655	,000
Pendapatan Asli Daerah	2,407	,081	,961	29,874	,000
Dana Alokasi Umum	,105	,081	,035	1,302	,196
Dana Alokasi Khusus	-,438	,182	-,062	-2,404	,018

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

¹ Berdasarkan hasil dari uji regresi linear berganda pada tabel 7 diatas yang kemudian dimasukkan kedalam persamaan model yang ada, diperoleh persamaan model regresi linear berganda, sebagai berikut: $KKPD = -1,088 + 2,407 PAD + 0,105 DAU - 0,438 DAK + e$

Uji Kelayakan Model

Uji F

Uji F juga dikenal sebagai uji kelayakan model atau uji signifikansi dalam keseluruhan dari regresi sempel. Uji F memiliki tujuan untuk menunjukkan bagaimana pengaruh yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria pengukuran dari pengujian pengaruh pada uji F ini adalah jika $uji F < 0,05$ maka model regresi berpengaruh signifikan sehingga layak, jika tingkat nilai signifikan pada uji F $> 0,05$ maka model regresi ini tidak berpengaruh secara signifikan sehingga tidak layak. Hasil uji F, sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5,869	3	1,956	869,773	,000 ^b
Residual	,247	110	,002		
Total	6,117	113			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

Sumber: Data sekunder diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 8 diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya nilai tersebut dibawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini layak untuk digunakan.

Uji (R²)

Uji (R²) atau uji koefisien determinan bertujuan untuk mengukur dan menilai seberapa kuat tingkat kemampuan dari persamaan regresi dalam mempengaruhi antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan koefisien regresi *Adjusted R Square* dikarenakan apabila nilai R² mendekati satu, maka hubungan antara kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variabel dependennya semakin baik. Sedangkan jika nilai R² mendekati nol, maka hubungan antara kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variabel dependennya semakin buruk.

Tabel 9
Hasil Uji R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,980 ^a	,960	,958	,04743	,821

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 9 diatas, dapat diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,960 yang artinya variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus sangat kuat dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan. Artinya hampir 96% variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen, namun nilai 4% ditimbulkan oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

Uji T

Uji T bertujuan untuk menguji dan menunjukkan seberapa jauh dan maksimal pengaruh pada variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yaitu jika tingkat signifikan < 0,05 maka hipotesis dapat diterima dalam arti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, jika tingkat signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak atau tidak diterima karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 10
Hasil Uji T

Model	Standardized Coefficients Beta	Sig.	Keterangan
1 (Constant)		,000	
PAD	,961	,000	Berpengaruh Positif
DAU	,035	,196	Tidak Berpengaruh
DAK	-,062	,018	Berpengaruh Negatif

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 10 diatas, menunjukkan hasil yang dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan yang menghasilkan nilai koefisien (β) sebesar 0,961 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya bahwa H_1 diterima, karena Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. (2) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan menghasilkan nilai koefisien regresi (β) sebesar 0,035 dan nilai signifikansi sebesar 0,196 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Artinya H_2 ditolak, karena Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. (3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan menunjukkan pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan menghasilkan koefisien regresi (β) sebesar -0,062 dan nilai signifikansi sebesar 0,18 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya H_3 diterima, karena Dana Alokasi Khusus dapat berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai t hitung sebesar 29,874, koefisien regresi (β) sebesar 2,407, dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menyatakan bahwa H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga kegiatan-kegiatan atau program yang dijalankan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya pada sektor pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur yang ada. Hal ini juga mendorong proses desentralisasi agar dapat berjalan dengan baik. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka akan meningkatkan kinerja keuangan daerah yang mana segala bentuk kegiatan yang ada di daerah akan terealisasi dengan baik. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan Pemerintah Daerah mengupayakan untuk menaikkan target dari penerimaan pendapatan daerahnya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat sehingga meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola sumber dan keuangan yang dimiliki.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik diatas, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai t hitung sebesar 1,302, koefisien regresi (β) sebesar 0,105, dan nilai signifikansi sebesar 0,196. Hal ini menyatakan bahwa H_2 ditolak, artinya dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Hal ini dikarenakan dana alokasi umum bukan berasal dari kreativitas pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah seperti dalam meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan sumber-sumber daerah, sehingga dana alokasi umum harus ditentukan berdasarkan perbandingan antara bobot pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penggunaan DAU ini hanya digunakan untuk mendukung sektor-sektor produktif saja. Jika semakin tinggi belanja yang diperlukan daerah yang mengakibatkan pemerintah tidak mampu membiayai sendiri dengan pendapatan asli daerah, maka membuat pemerintah daerah mengambil salah satu bantuan yang bersumber dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum. Hal ini mempengaruhi kemandirian daerah dalam mendanai dan membiayai semua kebutuhannya yang mengakibatkan ketetergantungan pemerintah daerah terhadap dana alokasi umum sehingga menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik diatas, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan dengan nilai t hitung sebesar -2,404 koefisien regresi (β) sebesar -0,438, dan nilai signifikansi sebesar 0,018. Hal ini menyatakan bahwa H_3 diterima, artinya dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dalam penerimaan dana alokasi khusus harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dana alokasi khusus disini digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah sebagai prioritas nasional dimana pendanaan ini untuk membiayai seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dalam peningkatan pembangunan daerah. Jika dana alokasi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin besar, dapat dikatakan bahwa daerah tersebut belum mandiri dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakatnya karena pemerintah daerah masih mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat sebagai penerimaan pendapatan

utamanya.

Dalam penerimaan dana alokasi khusus oleh pemerintah daerah akan diarahkan pada semua bentuk pembangunan dalam peningkatan dan perbaikan sarana prasarana sebagai prioritas nasional. Pemberian dana alokasi khusus juga memberikan pengaruh peningkatan terhadap pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai program kerja pemerintahan secara nasional dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dari hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian dalam mengatasi dan membiayai daerah di tahun berikutnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diatas tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang menggunakan metode olah data dengan jumlah data secara keseluruhan sebanyak 114 data, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, sehingga H_1 diterima. (2) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan, sehingga H_2 ditolak. (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan sehingga H_3 diterima.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil yang dikemukakan diatas, penelitian ini tidak luput dari keterbatasan yang membuat penelitian ini belum sempurna. Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini: (1) Objek penelitian berfokus pada pemerintah daerah Jawa Timur dengan rentang waktu tiga tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, sehingga jumlah observasinya sedikit dan tidak dapat mewakili secara umum daerah lain diluar Jawa Timur, namun akan jauh lebih baik lagi jika menambahkan objek penelitiannya. (2) Penelitian ini belum mampu menggambarkan secara penuh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa faktor yang dapat menunjang hasil penelitian ini. (3) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dimana data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan peneliti sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah daerah, pemerintah mampu menggali dari potensi-potensi yang ada untuk meningkatkan penerimaan pendapatan. Selain itu pemerintah daerah diharapkan mampu menggunakan dalam pengalokasian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Sehingga daerah dapat dengan mandiri untuk melakukan setiap pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan pendanaan tanpa bergantung kepada pemerintah pusat yang berdampak baik pada kinerja keuangan pemerintah daerah. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih luas pada objek penelitiannya yang tidak terbatas pada Provinsi Jawa Timur. Periode tahun yang diteliti juga dapat diperpanjang sehingga memperoleh hasil yang dapat menggambarkan secara sempurna hasil penelitian ini dan penelitian selanjutnya. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel atau menggunakan variabel independen lain yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. serta menggunakan metode yang lain dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah

sehingga akan timbul hubungan yang lebih sempurna di dalam penelitiannya. (3) Bagi masyarakat, badan instansi, usaha dan wajib pajak lainnya agar mengerti akan kewajibannya dan sadar untuk melakukan pembayaran wajib pajak tepat waktu sehingga membantu daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk mengurangi daerah dalam mengatasi kekurangan pendanaan sehingga bergantung kepada pemerintah pusat untuk pembiayaan kebutuhan pembangunan dan pelayanan yang dikembalikan kepada masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Asmawanti, D., dan Febriansyah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatra Bagian Selatan. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*, 3(1).
- Abdullah, S., dan Riani, L. 2020. Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Widya Ganecwara*, 10(4).
- Badan Pusat Statistik. 2019. Jumlah Kabupaten dan Wilayah Urban/Rural menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur: <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/04/18/1426/jumlahkecamatan-dan-wilayah-urban-rural-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2018.html#>. 1 Juni 2022 (20.48).
- Fatmawati, T. O. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*, Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- _____. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4).
- Febriansyah, A. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatra Bagian Selatan. *Jurnal Skripsi*.
- Fernandes, J., dan Hilwani, A. N. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, 4(2).
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A., dan Abdullah, S. 2010. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1).
- Harjito, Y., P. S. Nugraha dan Yulianto. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Di Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi* 5(1): 19-28.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, dan Suryono, B. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmudan Riset Akintansi*, 8(9).
- Indonesia, R. 1999. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan*

- dan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Kurniawan, K. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten dan Kota Provinsi Riau. *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatra Utara.
- Machmud, J., dan Radjak, L. I. 2018. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal Of Accounting Science*, 2(1).
- Mardiasmo. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Maulina, A., Akamal, M., dan Fahira, N. S. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(3).
- Prastiwi, N. D., dan Aji, A. W. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1).
- Pratiwi, T. W. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Priyono, N., Fatimah, A. N., dan Nurcahya, Y. A. 2020. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan (REP)*, 5(2).
- Putri, E. D. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Putri, N. N., & Darmayanti, N. A. 2019. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 8(9).
- Sari, B. I., dan Halmawati. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1-11.
- Sari, N., Nainggolan, B. R., Purba, R. A., Saragih, T. B., dan Banjarnahor, W. 2020. Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Economic, Business, and Accounting*, 4(1).
- Siagian, S. P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Sumarsono, S. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Thalib, F. 2019. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten di Jawa Timur Periode 2013-2017. *Artikel Ilmiah*.
- Ulum, I. 2012. *Audit Sektor Publik*. PT Bumi Perkasa. Jakarta.
- Verawaty, Jaya, A. K., Puspita, I., dan Nurhidayah. 2020. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatra Selatan. *Management, Business, and Accounting (MBIA)*, 19(1).
- Wahyudin, I., dan Hastuti. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1).
- Wenny, C. D. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja keuangan Pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan. *Jurnal Ilmiah, STIE MDP*, 2(1).

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH(2)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	10%
2	repository.unib.ac.id Internet Source	3%
3	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	3%
4	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%
5	core.ac.uk Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 100 words

Exclude bibliography On